

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Diakhir tahun 2019, media internasional dihebohkan dengan berita kemunculan wabah virus penyakit yang terjadi di Wuhan, China. Penyakit ini berasal dari virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Corona Virus 2* (SARS-COV 2) atau lebih banyak disebut Covid-19. Covid-19 adalah penyakit menular yang menginfeksi saluran pernapasan yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan kematian. Virus ini kebanyakan ditularkan dari berinteraksi secara langsung dengan penderita yang telah terinfeksi virus Covid-19 (WHO, 2020).

Pada awalnya, Covid-19 hanya menginfeksi puluhan ribu warga Tiongkok. Secara perlahan virus tersebut mulai menyebar ke negara tetangganya seperti negara Jepang, Korea Selatan, dan negara sekitarnya. Situasi semakin memburuk diawal tahun 2020 ketika penyakit yang disebabkan oleh virus Covid-19 sudah mulai menyebar dengan jangkauan yang sangat luas ke hampir semua negara di dunia. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa penularan dari penyakit akibat virus Covid-19 diklasifikasikan kedalam pandemi (Rassanjani et al, 2020). Menurut data WHO, pada 10 April 2020 pandemi Covid-19 telah mencatat lebih dari 1.604.500 kasus terkonfirmasi yang termasuk lebih dari 95.700 kematian (Ren-ful et al, 2020).

Pada awal Maret tahun 2020, pandemi Covid-19 diumumkan mulai muncul di Indonesia. Pada mulanya jumlah yang tercatat terjangkit Covid-19 berjumlah 2 orang di Indonesia. Disebabkan keterlambatan negara Indonesia dalam mengambil tindakan penanganan dan mengatasi penyebaran Covid-19 membuat peningkatan kasus yang tercatat terinfeksi Covid-19 di Indonesia (Suryahadi et al, 2020). Jaffrey (2020), mengatakan Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus terinfeksi

pandemi Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. Berdasarkan data gugus tugas penanganan Covid-19, pada tanggal 20 Juni 2020 tercatat lebih 45.000 orang yang terkonfirmasi positif Covid-19 yang mengakibatkan sebanyak 2.400 kematian (Suryahadi et al, 2020). Pada akhir tahun 2020 menurut laporan virus Covid-19 di Indonesia mencatat kasus yang terkonfirmasi positif semakin meningkat sebanyak 743.198 jiwa. Pada akhir tahun 2021 menurut data laporan virus Covid-19 jumlah yang dinyatakan terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia terus meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 4.262.720 jiwa (Andrafarm, 2022).

Menghadapi wabah virus pandemi Covid-19 yang terlihat dari jumlah terkonfirmasi positif yang semakin meningkat, banyak negara telah meminta warganya untuk tetap tinggal di rumah dan melakukan penutupan terhadap pergerakan penduduknya. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020, pada tanggal 31 Maret 2020 Indonesia mulai menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini dilakukan untuk membatasi dan mengatur pergerakan masyarakat guna mencegah dan memutus penyebaran Covid-19. Sejak pemberlakuan kebijakan pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah banyak aktivitas-aktivitas masyarakat yang dirumahkan. Selain itu, sejak pemberlakuan PSBB ini mengakibatkan banyak usaha-usaha tutup yang berimbas kepada penurunan pendapatan bahkan kehilangan mata pencarian selama masa pandemi Covid-19 melanda Indonesia (Aeni, 2021).

Menurut Buheji et al (2020), pandemi Covid-19 memiliki pengaruh terhadap peningkatan jumlah kemiskinan. Seseorang dikategorikan miskin apabila tidak mampu atau hanya nyaris tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan pokok, pakaian, dan tempat tinggal (Todaro & Smith, 2015). Kemiskinan yang dialami oleh masyarakat selama pandemi Covid-19 disebabkan oleh goncangan perekonomian yang menyebabkan penurunan rata-rata pengeluaran perkapita ditingkat rumah tangga. Sehingga apabila distribusi penurunan pengeluaran rumah tangga

perkapita terus berlanjut akan dapat menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan disuatu negara (Suryahadi et al, 2020).

Menurut Buheji et al (2020), ada tiga jenis kemiskinan utama yang terpengaruh oleh wabah pandemi Covid-19. Pertama, kemiskinan relatif yang terjadi karna ketimpangan pendapatan akibat dari banyak kelas menengah merasakan kemerosotan standar hidup sosial ekonomi yang tidak bisa mereka akses secara bebas karna ada pembatasan selama masa Covid-19. Kedua, kemiskinan absolut yang terjadi karna seseorang selama Covid-19 tidak memiliki pekerjaan dan kesulitan mencari pekerjaan penuh waktu. Ketiga, kemiskinan ekstrem yang diakibatkan oleh situasi dimana sekelompok orang yang mengalami kelangkaan makanan pokok, air bersih, tempat perlindungan, kesehatan, dan pendidikan. Kemiskinan ekstrem ini terjadi yang paling sedikit akibat dampak pandemi Covid-19.

Pada awal pandemi Covid-19 merebak mengakibatkan kasus kemiskinan di Indonesia ditahun 2020 meningkat (Suryahadi et al, 2020). Menurut data BPS, pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya yaitu dari 24.785.870 jiwa menjadi 27.549.690 jiwa. Namun, pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menurun dari periode sebelumnya menjadi 26.503.650 jiwa (BPS, 2022b). Dilihat dari persentase dari penduduk miskin, pada tahun 2020 persentase penduduk miskin Indonesia juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu dari 9,22 persen menjadi 10,19 persen. Namun, pada tahun 2021 persentase dari penduduk miskin di negara Indonesia kembali menurun dari periode sebelumnya menjadi 9,71 persen (BPS, 2022c).

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2021), penurunan kemiskinan selama masa pandemi Covid-19 salah satunya didorong oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dimaksudkan untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan untuk mengurangi

dampak yang dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional. Untuk mendukung pelaksanaan program PEN ini pemerintah mengalokasikan danannya yang bersumber dari APBN. Menurut data Kementerian Keuangan, jumlah dana PEN yang dialokasikan di APBN pada tahun 2020 sebesar 695,2 triliun. Kemudian jumlah alokasi dana untuk PEN dalam APBN pada tahun 2021 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 744,77 triliun.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185 Tahun 2020, program PEN dibentuk untuk pemulihan perekonomian terhadap di bagian konsumsi dan produksi yang mengalami dampak selama Covid-19. Terdiri atas enam sektor yang dikategori ke dalam sisi *supply* dan *demand*. Sektor PEN dimasukkan ke sisi *demand* atau ditujukan ke perorangan adalah pendanaan yang ditujukan untuk perlindungan sosial, kesehatan, belanja sektoral kementerian/lembaga dan sektor pemerintah daerah. Selanjutnya, sektor yang termasuk ke sisi *supply* atau ditujukan untuk pelaku usaha terdiri atas dana untuk insentif perpajakan, bantuan pembiayaan korporasi, dan dana untuk UMKM.

Menurut Badan Kebijakan Fiskal (2021), program dari PEN yang berdampak langsung terhadap kemiskinan pada masa pandemi Covid-19 adalah program dibidang perlindungan sosial. Hal ini karna instrumen perlindungan sosial mampu melindungi masyarakat miskin dan kelas menengah yang rentan dengan menahan angka kemiskinan pada September 2020 dilevel 10,19 persen yang sebelumnya diperkirakan oleh Bank Dunia mencapai 11,8 persen. Selain itu, program PEN yang juga mendukung masyarakat miskin dan rentan agar tetap bertahan dari dampak pandemi melalui pemberian insentif usaha yang terutama diberikan kepada kelompok Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sehingga aktivitas transaksi ekonomi UMKM bisa tetap berjalan yang membuat daya beli masyarakat miskin dan rentan terdampak bisa terjaga di masa pandemi.

Selain itu, menurut Nafziger (2006), salah satu faktor yang memiliki pengaruh terhadap penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi ditimbulkan oleh peningkatan output dari banyaknya barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian wilayah (Case & Fair, 2006). Selain itu, pertumbuhan ekonomi terjadi akibat peningkatan pendapatan yang diperoleh yang mendorong peningkatan konsumsi barang dan jasa (Mankiw, 2009). Sehingga apabila terjadi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan pendapatan yang akan berdampak kepada pengurangan jumlah kemiskinan (Nafziger, 2006).

Menurut publikasi BPS, pada tahun 2020 pertumbuhan perekonomian Indonesia sejak pandemi Covid-19 melanda mengalami kemerosotan dari tahun-tahun sebelumnya. BPS mencatat pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi negara Indonesia sebesar minus 2,07 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 di Indonesia merupakan yang terparah menurut data BPS. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi negara Indonesia kembali meningkat menjadi 3,69 persen (BPS, 2022d).

Selanjutnya menurut penelitian Suripto & Subayil (2020), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh terhadap kemiskinan. IPM sendiri merupakan salah satu alat ukur dari pembangunan manusia disuatu wilayah (BPS, 2021a). IPM memiliki beberapa indikator yang mempengaruhi suksesnya pembangunan manusia yaitu kesehatan, pendidikan, dan pengeluaran. Ketika IPM meningkat maka akan mengurangi kemiskinan. Hal ini karna semakin meningkatnya kualitas manusia sehingga akan membuat meningkatnya produktifitas yang akan meningkatkan pendapatan yang membuat seseorang keluar dari zona kemiskinan (Suripto & Subayil, 2020).

Berdasarkan data yang dipublis oleh BPS menunjukkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) negara Indonesia mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Namun, semenjak pandemi Covid-19 melanda tingkat pertumbuhan IPM Indonesia mengalami penurunan. Menurut data BPS, pada tahun IPM negara Indonesia 2020 yaitu 71,94 persen. Kemudian pada tahun 2021, menurut data IPM negara Indonesia meningkat dari

periode sebelumnya yaitu menjadi 72,29 persen. Peningkatan IPM ditahun 2021 didukung oleh peningkatan pada indeks pengeluaran (pengeluaran riil perkapita), kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), dan pendidikan (pengetahuan) (BPS, 2021b).

Kemudian menurut penelitian Lewaherilla (2021), faktor yang memiliki pengaruh terhadap kemiskinan adalah pengangguran. Seseorang dikatakan pengangguran apabila keadaan seseorang yang tidak bekerja, bersedia bekerja, dan mencari pekerjaan (Mankiw, 2009). Selain itu, seseorang dikategorikan seorang pengangguran apabila seseorang yang termasuk kedalam golongan angkatan kerja tapi tidak memiliki pekerjaan (Case & Fair, 2006). Untuk kategori angkatan kerja sendiri meliputi penduduk yang sudah berusia minimal 15 tahun sampai maksimal berusia 65 tahun. Ketika seseorang menganggur secara umum mereka tidak memiliki pendapatan yang akan mendorong seseorang masuk kezona kemiskinan (Sukirno, 2016).

Salah satu alat ukur untuk mengetahui jumlah penduduk dikategorikan kedalam angkatan kerja tetapi belum juga bekerja dihitung dari persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Semenjak pandemi Covid-19 melanda TPT negara Indonesia mengalami peningkatan. Menurut data BPS, TPT negara Indonesia ditahun 2020 yaitu 7,07 persen. Kemudian pada tahun 2021, menurut data BPS untuk TPT negara Indonesia turun 0,58 persen dari periode sebelumnya. Sehingga ditahun 2021 TPT negara Indonesia menjadi 6,49 persen (BPS, 2022f).

Berdasarkan penjelasan diatas disimpulkan jumlah dan persentase penduduk miskin di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup besar sejak wabah pandemi Covid-19 melanda negara Indonesia pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 saat kasus pandemi Covid-19 mengalami peningkatan yang dilihat dari kasus terkonfirmasi positif untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia sendiri mengalami penurunan. Selama pandemi Covid-19 melanda pemerintah membuat kebijakan anggaran dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang jumlah anggaranya semakin meningkat dari tahun 2020 sampai 2021. Sementara itu, dilihat



dari faktor-faktor lain menurut penelitian terdahulu juga mempengaruhi kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi, IPM meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021 serta TPT mengalami penurunan dari 2020 ke 2021. Oleh sebab itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam kajian skripsi dengan judul “Analisis Kemiskinan Pada Masa Pandemi Covid-19 (studi antar provinsi di Indonesia tahun 2020-2021).”

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dari pemaparan dan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah didalam penelitian ini adalah berikut ini.

1. Bagaimana pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 ?
2. Bagaimana pengaruh penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 ?
3. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 ?
4. Bagaimana pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 ?
5. Bagaimana pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021 ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang dan rumusan masalah penelitian diatas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian adalah berikut ini.

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pandemi Covid-19 terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai tahun 2021.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh dari penyaluran dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021.

3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021.
4. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021.
5. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 sampai 2021.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari dilakukannya penelitian adalah berikut ini.

1. Bagi peneliti penelitian ini dijadikan sebagai salah satu pemenuhan syarat kelulusan dan memperoleh gelar sarjana di Departemen Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas. Selain itu, penelitian ini mampu menambah wawasan dan pengetahuan serta diharapkan mampu mengembangkan daya pikir ilmiah peneliti terhadap kajian-kajian ekonomi.
2. Bagi Akademik Penelitian ini diharapkan mampu memberi tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan bahan bacaan dan dijadikan pedoman untuk kajian selanjutnya.
3. Bagi Pemerintah Dari hasil analisis yang telah diperoleh menjadi tambahan informasi serta rujukan dalam merancang kebijakan yang berhubungan dengan permasalahan kemiskinan.

